

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berdasarkan dengan berbagai informasi dari penelitian dan jurnal-jurnal yang telah ada untuk dijadikan pendekatan dan perbandingan terhadap keterkaitannya dengan judul penulis mengenai pengaruh komisaris independen, ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berikut daftar penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai referensi:

Penelitian yang dilakukan oleh (Wardhany et al., 2019) dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam LQ45 Pada Periode 2015-2018)”** yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel yang digunakan purpose sampling sehingga sampel akhir yang diperoleh adalah 26 perusahaan yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis bahwa profitabilitas memiliki dua proksi yaitu ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan ROE profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Leverage memiliki proksi DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan ukuran perusahaan bernilai positif tetapi tidak signifikan pada nilai perusahaan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmatia et al., 2020) dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan”** dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu menggunakan metode purpose sampling sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 13 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable komisaris independent tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Reputasi KAP mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan, komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan secara bersama-sama komisaris independen, reputasi KAP, opini audit dan komite audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Ardanty & Sofie, 2016) dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”**. Penelitian ini merupakan empiris dengan metode purposive sampling dalam pengumpulan data. Data yang di peroleh dari data sekunder laporan keuangan 276 perusahaan manufaktur yang terdaftar dari Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Dengan menggunakan alat analisis statistic deskriptif untuk analisa data. Hasil dari penelitian menunjukkan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, sedangkan komisaris independen, kepemilikan publik, kepemilikan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Perusahaan yang di audit oleh KAP Big4 lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan komisaris independen tidak mempengaruhi keputusan ketepatan pelaporan keuangan, dimana bila tingkat komite audit yang tinggi maka ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan akan rendah.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh (Elviani, 2017) yang berjudul **“Faktor-faktor Berpengaruh Bagi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”**, Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel *non-random* yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, demikian pula struktur kepemilikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Kualitas auditor tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Jayanti, 2018) dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan”**. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang terdiri dari ukuran perusahaan, kualitas audit, dan profitabilitas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Metode *purposive sampling*, data yang di peroleh dari data sekunder. Alat analisis data menggunakan regresi logistik dengan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diukur mempengaruhi ketepatan penyampaian pengajuan laporan keuangan sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak mempengaruhi ketepatan penyampaian pengajuan laporan keuangan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Ha et al., 2018) dengan judul **“The Study Of Factors Affecting The Timeliness Of Financial Reports: The Experiments On Listed Companies In Vietnam”** penelitian ini menggunakan data panel dengan 1070 pengamatan, di 214 perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam pada periode 2012-2016. Di peroleh dari metode GLS hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *financial leverage* dan industri mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan konsolidasi, perusahaan audit, profitabilitas dan ukuran bisnis tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan ada perbedaan dan makna statistik dalam waktu penerbitan berbagai jenis dan waktu laporan keuangan.

Penelitian selanjutnya oleh (Adebayo & Adebiyi, 2016) yang berjudul **“Effect Of Firm Characteristics On The Timeliness Of Corporate Financial Reporting: Evidence From Nigerian Deposit Money Banks”** penelitian ini bertujuan untuk ketepatan waktu keuangan pernyataan di antara Deposit Money Bank di Nigeria. Untuk penelitian ini, kami memilih sampel 15 Deposit Money Bank yang terdaftar di Bursa Efek antara tahun 2005 dan 2013. Data di analisis dan hasil di estimasi menggunakan Regresi Ordinary Least Square (OLS) yang dilengkapi dengan teknik estimasi data panel. Studi ini di uji untuk hubungan antara

ukuran bank, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan audit dan ketepatan waktu laporan keuangan. Semua variabel yang diperiksa ternyata signifikan secara statistik kecuali untuk leverage. Hasil temuan mengungkapkan bahwa sebagian besar bank kini telah mematuhi peraturan yang mana meningkatkan pelaporan laporan keuangan tepat waktu di Nigeria. Sangat di sarankan agar badan pengatur hendaknya tidak membiarkan jeda waktu terlalu lama sehingga laporan akan bermanfaat untuk tujuan yang di maksudkan.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh (Ekiabor & Oluwole, 2018) dengan judul “*Reliability of Timeliness in Financial Reporting in Nigeria*” dengan menggunakan metode kuantitatif dan sampel terdiri dari perusahaan yang dikutip di bursa Nigeria. Analisis data yang digunakan yaitu statistic deskriptif, statistic korelasi dan analisis regresi. Hasil menunjukkan usia perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap garis waktu pelaporan keuangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan mengenai ketidaksamaan kepentingan antara principal dan agent yang dapat menimbulkan masalah *agency theory*. Prinsip utama teori ini adalah menyatakan adanya hubungan kinerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) yaitu pemilik (pemegang saham), kreditor, serta investor dengan pihak penerima wewenang (*agent*) yaitu manajemen perusahaan, dalam bentuk kontrak hubungan kerja sama.

Teori keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menggambarkan terdapatnya sebuah hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak prinsipal dengan pihak agen. Adanya pemisahan tugas antara pihak prinsipal dengan pihak agen dapat memunculkan konflik keagenan, sehingga dalam penelitian ini menjelaskan bahwa elemen-elemen komisararis independen, komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan 25 audit *tenure* yang ada dalam perusahaan

dapat mengurangi konflik dari keagenan dan menciptakan integritas laporan keuangan.

Dalam teori agensi ini, diharuskan memberikan informasi yang rinci dan relevan kepada *principal*. Namun, pada kenyataannya hal tersebut bukan lah yang mudah, karena adanya perbedaan kepentingan antaraagen dan *principal*. Kepentingan *principal* sebagai pemegang saham adalah untuk memperoleh pengungkapan informasi oleh agen mengenai keadaan perusahaan secara relevan, tepat waktu dan juga akurat, sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, disisi lain terdapat agen sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dan tidak bergantung pada pengungkapan informasi dalam pembuatan keputusan.

Jadi, teori keagenan untuk membantu komite audit bila terjadi konflik kepentingan yang muncul antara pemilik dan manajemen. Dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat menyampaikan pelaporan keuangan perusahaan secara tepat waktu sehingga laporan keuangan tidak kehilangan relevansi nya dan berguna bagi investor dalam mengambil keputusan.

2.2.2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emite. Pengumuman ini akan mempengaruhi naik atau turunnya harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan pengumuman. Perusahaan yang mempunyai keyakinan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik kedepannya akan mengkomunikasikan berita tersebut terhadap para investor. Perusahaan yang berkualitas baik nantinya akan memberi sinyal dengan cara menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, maka hal ini tidak bisa di tiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk, karena perusahaan yang berkualitas buruk akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

2.2.3. Pengertian Komisaris dan Jenis-Jenis Komisaris

Komisaris sebuah organisasi adalah anggota dewan pengawasnya. Beberapa istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan hubungannya terhadap organisasi tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.

Jenis-Jenis Komisaris:

1) Komisaris Utama

Komisaris (atau komisaris dalam, *inside director*) adalah seorang komisaris yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut.

2) Dewan Komisaris

Berdasarkan struktur GCG, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. RUPS bertindak sebagai organ yang mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan kepengurusan Perseroan termasuk memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan tujuan dan kepentingan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga turut mengawasi penerapan praktik GCG secara optimal di setiap lini Perusahaan.

3) Komisaris Utusan

Komisaris Utusan merupakan komisaris yang di tunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan kedudukan hukum Komisaris Utusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Komisaris itu sendiri.

2.2.3.1. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan manajemen, dewan direksi atau pemegang saham yang dapat mempengaruhi independennya. Tujuannya dalam membentuk komisaris independen dengan menyeimbangkan pengambilan keputusan serta melindungi pemegang saham minoritas dan pihak lainnya. Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, peran penting dewan komisaris yaitu untuk memonitoring dan sebagai pengesahan, agar pelaksanaan ratifikasi efektif dewan komisaris harus melibatkan manajer internal dengan keahlian tertentu. Menurut (Pramana & Ramantha, 2015) salah satu fungsi utama komisaris independen yaitu mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal. Komisaris independen di hitung menggunakan jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah komisaris dalam susunan dewan komisaris. Adanya dewan komisaris independen dengan presentase yang tinggi dalam perusahaan di indikasikan dengan mengawasi perilaku oportunitik dalam manajemen, meningkatkan kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan serta mengurangi manfaat dari penyembunyian informasi.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar perusahaan.
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- 3) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.

- 5) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya, sepanjang Komisaris Independen tersebut tetap independen dan pernyataan independensinya wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

2.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Besar atau kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak memiliki sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat sehingga semakin cepat dalam penyelesaian laporan keuangan. Ukuran perusahaan dapat diukur dari total penjualan, nilai aktiva, dan jumlah tenaga kerja. Perusahaan besar mampu menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dengan pemikiran bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang banyak dan memiliki sistem informasi yang handal, sehingga mendukung untuk penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu.

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan.

2.2.5. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan sebagai profitabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi didalam sistem akuntansi klien. Laporan keuangan yang disampaikan kepada BAPEPAM merupakan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik. Auditor yang berkualitas tinggi harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar umum yang pertama menunjukkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum yang kedua yaitu mengatur sikap mental independen auditor dalam tugasnya. Standar umum yang ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Berbagai penelitian tentang kualitas audit pernah dilakukan oleh (Deis & Gary, 1992) mereka meneliti faktor penentu kualitas audit di sektor publik dengan menggunakan sampel KAP yang mengaudit institusi sector public. Studi ini menganalisis temuan *Quality Control Review*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama hubungan dengan klien, jumlah klien telah dari rekam audit (*peer review*), ukuran dan kesehatan kualitas audit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah Pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan, profesionalisme dan beban kerja.

Simunic dalam Naim (1999) menyatakan bahwa perbedaan karakteristik jasa audit adalah indentik dengan penawaran. Perbedaan karakteristik jasa audit tercermin dalam perbedaan kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin besar fee audit maka kualitas audit semakin baik. De Angelo (1988) dalam Naim (1999) mendefinisikan kualitas audit sebagai gabungan profitabilitas pendekteksian dan pelaporan kesalahan laporan keuangan yang material.

Due professional care dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan, serta memiliki ketekunan dalam melaksanakan tanggung jawab. Tujuan audit secara

umum atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.2.5.1. Standar Auditing

Menurut (Arens et al., 2014), standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti audit. Tiga perangkat utama standar auditing adalah International Standards on Auditing, U.S. Generally Accepted Auditing Standards (Standar Auditing AICPA) untuk entitas selain perusahaan publik dan PCAOB Auditing Standards.

Secara historis standar auditing telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar auditing yang berlaku umum *Generlly Accepted Auditing Standards* (GAAS) yang dibagi menjadi 3 atau di Indonesia di sebut dengan SPAP:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecapakan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - b. Mempertahankan sikap mental yang independent dalam semua hal yang berkaitan dengan audit.
 - c. Menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Mengerjakan pekerjaan secara memadai dan mengawasise semua asisten sebagaimana mestinya.

- b. Memperoleh pemahaman yang cukup secara mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan luas pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Memiliki bukti audit yang cukup dan harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
 - b. Laporan harus mengidentifikasi keadaan dimana prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan, jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam laporan audit.
 - d. Laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bias diberikan. Jika tidak dapat menyatakan suatu pendapat secara keseluruhan auditor harus menyatakan alasan yang mendasari.

2.2.6. Laporan Keuangan

Menurut Mulyadi (2002:61) laporan keuangan merupakan suatu penyajian data keuangan dan termasuk catatan penerimaannya bila ada, serta untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi dan/atau kewajiban entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan yaitu untuk kepentingan umum, untuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dari entitas yang sangat berguna dalam membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada saat waktu tertentu, dilaporan dalam neraca, perhitungan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan serta arus kas.

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan ditambah dengan informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earning, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Yadiati, 2010: 52).

Jenis-Jenis Laporan Keuangan ada 5 (lima) yaitu:

1. Laporan Laba Rugi
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Posisi Keuangan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pengertian Nilai Buku

Nilai Buku atau *Book Value* adalah nilai sebuah aset atau sekelompok aset yang tercatat di neraca keuangan sebuah perusahaan. Nilai Buku ini dihitung dengan mengurangi jumlah akumulasi penyusutan aset dari harga pembelian awal atau biasanya disebut dengan biaya historis. Dengan kata lain, nilai buku menyesuaikan biaya historis suatu aset dengan jumlah akumulasi penyusutan.

Perlu diketahui bahwa *Book Value* atau Nilai Buku tidak harus sama dengan nilai pasar suatu aset, karena nilai pasar suatu aset biasanya didasarkan pada penawaran dan permintaan ataupun nilai yang dipersepsikan, sedangkan Nilai Buku hanyalah perhitungan akuntansi.

Dalam hal investasi, Nilai Buku dapat juga dapat dianggap sebagai jumlah yang secara teoritis akan diterima oleh investor setelah mengurangi semua kewajiban perusahaan jika entitas atau perusahaan yang diinvestasinya tersebut dilikuidasi.

2.2.6.1. Karakteristik Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan 4 karakteristik kualitatif yang pokok dalam laporan keuangan:

1. Dapat Dipahami

Kualitas yang penting bagi informasi yang ditampung didalam laporan keuangan dengan kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh masyarakat atau pemakai. Dalam arti, pemakai diasumsikan bias memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa depan dengan mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

3. Keandalan

Informasi yang memiliki kualitas yang handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material dan bisa diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan.

2.2.7. Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatanwaktuan berkaitan dengan teori kepatuhan. Kepatuhan akan pelaporan keuangan tahunan perusahaan publik di atur dalam peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995. Dengan adanya regulasi tersebut hendaknya perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu.

Ketepatan penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor sebagai dasar penentuan tindakan pada masa yang akan datang (Hastutik, 2015). Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negative dari perilaku pasar modal. Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan tahunan yang menyatakan emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama pada akhir bulan keempat (4) setelah tahun buku berakhir.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan, dimana laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu dapat mengurangi informasi asimetri (Ade Rahma et al., 2019). Semakin lama waktu tertunda dalam penyajian maka semakin banyak kemungkinan terdapatnya insider information mengenai perusahaan tersebut. Berbagai peraturan tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu beserta sanksinya yang menunjukkan tingginya komitmen pembuat peraturan (*regulator*) dalam menanggapi kasus ketidak patuhan penyampaian laporan keuangan, namun regulasi tersebut belum efektif diterapkan oleh perusahaan di Indonesia.

Sebagai aspek pendukung keberpautan, ketepatan waktu merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan, sebelum informasi kehilangan kekuatan untuk dapat mempengaruhi keputusan yang harus diambil dengan segera. Tersedianya informasi yang lama setelah suatu

kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan yang berlaku menjadikan informasi tersebut tidak mempunyai nilai. Karena ketepatan waktu tidak membuat informasi menjadi berpaut, tetapi kurangnya ketepatan waktu yang dapat menyita keberpautan yang melekat pada sebuah informasi.

Ketepatan waktu tidak akan menjamin relevansi, tetapi relevansi tidak lah mungkin tanpa ketepatan waktu. Karena, ketepatan waktu merupakan batasan yang penting bagi publikasi laporan keuangan.

2.2.8. Good Corporate Governance

Definisi *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesian* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, sistem yang mengatur atau mengendalikan perusahaan. Sedangkan tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* 5 prinsip *corporate governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Secara keseluruhan konsep *corporate governance* timbul karena adanya upaya untuk mengendalikan perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri. *Corporate governance* menciptakan mekanisme serta alat control untuk menciptakan sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholder* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan. *Corporate governance* merupakan pedoman bagi manajer dalam mengelola perusahaan serta *best practice*.

2.2.8.1. Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Dari definisi *Corporate Governance* yang disampaikan di atas, dapat memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian

perusahaan dengan kata lain prinsip dasar *Good Corporate Governance* disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Secara sederhana bisa di artikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholder* nya serta baik dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yang di maksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholders* juga kepada *stakeholders* lainnya.

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang berlaku yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor yang pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Ada dua prinsip utama dalam *Good Corporate Governance* yaitu pertama, kejelasan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dengan tepat waktu dan yang kedua yaitu itikad perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

2.2.8.2. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut (Salindeho et al., 2018) tujuan *Good Corporate Governance* yaitu ada lima:

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholders* dan *stakeholders* perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
5. Untuk meningkatkan investasi nasional.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan

Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen sehingga manajemen mampu bekerja secara maksimal. *Corporategovernance* di proksikan dengan komposisi komisaris independen diperkirakan mampu mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan. Hal ini diinterpretasikan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh positif karena dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Sehingga komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan dapat berjalan tepat waktu dalam suatu perusahaan (Ida Bagus, 2017). Selain itu menurut (Budiasih & Saputri, 2017) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu komisaris independen tidak berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

2.3.2. Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan

Salah satu atribut yang di hubungkan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar akan menyelesaikan audit yang lebih cepat di bandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil, karena perusahaan yang besar memiliki lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi yang canggih.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena setiap kenaikan variabel ukuran perusahaan akan menaikkan

integritas laporan keuangan (Verya, 2016). Menurut Beladina dan Martha (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, yakni perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu dalam membiayai penyediaan informasi untuk keperluan pengungkapan kepada pihak eksternal perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang kecil memiliki sumber daya yang *relative* sedikit maka perusahaan memungkinkan tidak memiliki informasi yang siap untuk disajikan sebagaimana yang dimiliki oleh perusahaan besar sehingga perusahaan kecil memiliki biaya tambahan yang *relative* besar dalam melakukan pengungkapan informasi yang lebih lengkap. Sedangkan menurut (Astuti & Erawati, 2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

2.3.3. Kualitas Audit Terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan

Kualitas audit mempengaruhi keputusan ketepatan waktu laporan keuangan dimana bila tingkat kualitas audit yang tinggi, maka ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan akan rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jayanti, 2018) yang beranggapan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Dalam hal ini perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* (4) lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Karena KAP besar cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit dibandingkan dengan KAP *non big four*, Berbeda dengan Chisanty dan Daljono (2010) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Ketepatan waktu tidak dapat ditentukan berdasarkan ukuran KAP yang mengaudit suatu perusahaan.

2.4. Perkembangan Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Komisari Independen berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
- H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
- H3 : Kualitas Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

2.5. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

